



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 29 April 2021

Halaman: 1

media massa : Hari : Tanggal : Halaman :

Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Terima Masukan Masyarakat

Dorong Penataan Perizinan Menara Telekomunikasi

Penataan menara telekomunikasi di Kota Jogja menjadi salah satu yang banyak disampaikan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kota Jogja.

PANSUS merekomendasikan penataan dalam perizinan. Meski belum pada tahap pembahasan, tetapi sudah dalam tahap RDPU. Ketua Pansus DPRD Kota Jogja, Cahyo Wibowo mengatakan, *output* dari raperda tersebut pada akhirnya ialah mempunyai kualitas yang memberikan kenyamanan kepada tiga unsur yakni untuk pemkot, *stakeholder* provider, dan masyarakat itu sendiri. "Kami mencoba mengkombinasikan tiga unsur tersebut untuk masuk di raperda itu," katanya kepada *Radar Jogja* kemarin (28/4).

Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Jogja itu menjelaskan, dari anggota pansus maupun kalangan dewan itu juga berupaya men-

terjemahkan rencana perda tersebut. Termasuk juga akan mengikuti turunan perda yang sudah disyahkan. Seperti perda RTRW, rencana tata ruang wilayah dan juga melakukan sinkronisasi dengan raperda bangunan gedung yang saat ini masih digodok.

CEK MENTEL: Petugas melakukan pengecekan pada menara telekomunikasi (mentel) di Kota Jogja. Pansus Raperda Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi mendorong penataan perizinan.

Sumbangan dari hal 1

"Dan rekomendasi ini sudah kami sampaikan ketika RDPU. Setelah ini kami melakukan DIM (daftar inventaris masalah) masing-masing fraksi," ujarnya.

Dikatakan Cahyo, rekomendasi ini erat kaitannya pada bagian perizinan. Termasuk disitu juga memperbaiki komunikasi sinergitas lintas *stakeholder* terkait dengan perizinan tersebut.

"Salah satunya kemungkinan ke sana (ada penerbitan). Jadi nanti ada evaluasi dengan adanya menara telekomunikasi yang ada saat ini," tandasnya.

Tujuan pembahasan raperda yang baru ini juga untuk menghasilkan kualitas perda yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan target *output* penataan perizinan. Namun demikian, tidak menampik yang menjadi kesulitan ketika pengajuan perizinan tersebut melalui *Online Single Submission* (OSS) milik pemerintah pusat. "Berarti ada kaitannya dengan pusat. Apakah justru besuk akan semakin baik tidak, itu kepentingan pusat," jelasnya.

Berdasarkan data yang dipunyai Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Jogja, sampai saat ini sebanyak 220 titik lokasi menara di Kota Jogja. Jumlah itu terdiri dari semua jenis tipe menara. Adapun data menara yang telah diterbitkan surat IMB oleh dinas terkait sebanyak 107 titik.

Sisanya, sekitar 113 titik menara belum diterbitkan IMB.

terbitkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh dinas terkait sebanyak 107 titik. Sisanya, sekitar 113 titik menara belum diterbitkan IMB.

Terkait 113 titik menara yang belum ber-IMB, Cahyo memperkirakan, karena terkendala hal administrasi. "Sehingga mungkin dalam pengamatan saya bisa jadi belum diterbitkan. Karena kan syarat-syarat administrasinya banyak," tambahnya. (via/pra/f)

DATA DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA JOGJA

- 220 titik Lokasi menara di Kota Jogja.
- Jumlah itu terdiri dari semua jenis tipe menara. Adapun data menara yang telah diterbitkan surat IMB oleh dinas terkait sebanyak 107 titik.
- Sisanya, sekitar 113 titik menara belum diterbitkan IMB.

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala

Ttd

Ig. Trihastono, S.Sos, MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005